

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Ciangsana km. 6,2 Cikembar, Sukabumi.**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang tersusun dari hasil serangkaian proses evaluasi dan perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sukabumi selama 5 (lima) tahun ke depan guna mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi.

Uraian dari setiap pembahasan dalam dokumen ini tentunya belum menggambarkan perkembangan dari keseluruhan pembangunan aspek ketahanan pangan Kabupaten Sukabumi. Namun, dalam penyusunan mendatang diharapkan dapat terus disempurnakan dengan berbagai indikator yang lebih relevan, cakupan informasi perencanaan yang lebih luas dan diharapkan mampu mendorong serta mengakselerasi gerak dan langkah para pelaku pembangunan hingga ke tingkat petani di lapangan.

Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan berbagai pihak dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi ini. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan dokumen Renstra di masa mendatang.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN SUKABUMI



Dr. Ir. H. DANA. BUDIMAN, M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19620316 198903 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
SK Tim Penyusun Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan.....	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sasaran.....	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	36
3.3 Telaahan Renstra Kementrian RI dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.....	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	45
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	49
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	83
BAB VIII PENUTUP.....	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Jabatan.....	10
2 Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Golongan.....	11
3 Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan.....	12
4 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang tertuang dalam Capaian Indikator Kinerja selama periode 2016-2021 (T-C 23).....	14
5 Indikator Kinerja Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan.....	15
6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan.....	17
7 Indikator Kinerja Peningkatan Cadangan Pangan Tahun 2021.....	18
8 Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Cadangan Pangan.....	19
9 Indikator Kinerja Peningkatan Ketersediaan Energi Tahun 2021.....	20
10 Ketersediaan Energi dari Neraca Bahan Makanan Tahun 2021.....	21
11 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Tahun 2021.....	24
12 Data Hasil Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2021.....	24
13 Hasil Uji Keamanan Pangan Dinas ketahanan Pangan Tahun 2020.....	26
14 Indikator Kinerja Persentase Distribusi dan Akses Pangan Tahun 2021.....	28
15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi (T-C 24)	29
16 Target Kinerja Pelayanan DKP Kab. Sukabumi Tahun 2021-2026.....	30
17 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sukabumi.....	35
18 Telaah Visi, Misi, dan Program KDH.....	39
19 Telaah Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.....	43
20 Arah kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 1 dan TPB 10 sesuai kewenangan Dinas Ketahanan Pangan.....	46
21 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sukabumi Tahun 2021 – 2026 (T-C 25).....	50
22 Keterkaitan sasaran RPJMN, RPJMD Jawa Barat dengan RPJMD Kab. Sukabumi..	52
23 Prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi 2021-2026.....	52
24 Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi.....	53
25 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026 (T-C 26).....	55
26 Deskripsi Strategi dan Arah Kebijakan DKP Tahun 2021-2026.....	55
27 Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 (T-C 27).....	61
28 Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026.....	84
29 Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (T-C 28).....	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi	9
2 Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Jabatan	10
3 Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Golongan	11
4 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kab. Sukabumi Tahun 2019.....	15
5 Grafik Persentase Capaian Indikator 1.....	17
6 Grafik Persentase Capaian Indikator 2.....	19
7 Grafik Persentase Capaian Indikator Kinerja 3.....	22
8 Grafik Target dan Capaian Angka Ketersediaan Energi 2016-2021.....	22
9 Grafik persentase capaian indikator kinerja no. 4.....	25
10 Grafik target dan capaian skor PPH konsumsi	25
11 Grafik persentase capaian indicator kinerja no. 5.....	28
12 Peta Strategi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD bersifat makro, yang memuat visi, misi, program prioritas dan rencana penganggaran. RPJMD merupakan kesepakatan para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah mengenai program prioritas 5 (lima) tahun kedepan yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor penyusunan visi, misi dan program program pembangunan. RPJMD menjadi pedoman penyusunan program prioritas jangka menengah bagi Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kondisi, potensi dan karakteristik daerah serta penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Renstra perangkat Daerah akan menjadi pedoman saat menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam ketentuan Pasal 272 dan 273 UU No. 23 Tahun 2014 memuat tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perangkat Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd.

Penyusunan Renstra perangkat daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan di dalam RPJMD.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, saat ini sudah memasuki tahapan pembangunan akhir keempat 2018-2023. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ketiga tersebut ditujukan untuk mencapai kemandirian Jawa Barat dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional.

Penjabaran dari visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan perencanaan penganggaran sebagai upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sukabumi yaitu **“INOVASI BERKELANJUTAN PADA KOMODITAS UNGGULAN UNTUK PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN SUKABUMI”**.

Prioritas pembangunan pada tahapan keempat ini diantaranya adalah ketahanan pangan dan bidang pertanian diarahkan pada pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian hulu sampai dengan hilir, setelah diperolehnya komitmen terhadap pembangunan pertanian di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah memberikan tugas khusus kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi untuk melakukan fungsi-fungsi di bidang ketahanan pangan seperti ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan. Sejalan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi global dan perkembangan jumlah penduduk yang cukup tinggi, tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan semakin kompleks sehingga Dinas Ketahanan Pangan harus responsif terhadap perkembangan teknologi, dan isu-isu lainnya yang berkembang di dunia global, seperti "climate change", "food security" dan sebagainya.

Oleh karena itu, untuk merespon kompleksnya permasalahan, tantangan dan besarnya lingkup pekerjaan yang harus dilakukan dalam sektor ketahanan pangan, maka

jelas bahwa pembangunan sektor ketahanan pangan tidak bisa dilakukan hanya oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi. Pembangunan Ketahanan Pangan memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan yang mencakup sektor lainnya, perguruan tinggi, pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa, dunia usaha, perbankan, lembaga-lembaga pembiayaan bukan bank, organisasi profesi dan kemasyarakatan, serta peran aktif dari semua di Kabupaten Sukabumi sebagai pelaku utama pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan tahun 2021 – 2026 merupakan rencana strategik (mengenai sasaran-sasaran utama yang akan dicapai) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu tahun 2021 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara untuk mencapai tujuan dan sasaran) yang berfungsi menjabarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021 – 2026 dibidang ketahanan pangan. Penyusunan Renstra telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur pimpinan, pejabat kunci dan Staf yang mampu memberikan masukan serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu Penyusunan Renstra telah memperhatikan RPJMD Kabupaten Sukabumi, Renstra Kementerian Pertanian Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Renstra Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2021 – 2026 telah mengacu pada Renstra terkait.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6442);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Permendagri No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 04 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 30);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi;
29. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi;
30. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi;
31. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 050/Kep.573-DKP/2021 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2021 – 2026 adalah menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan selama lima tahun ke depan sesuai permendagri 90 tahun 2020, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 Sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-Perangkat Daerah dan penetapan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2021 – 2026 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.

1.3.2 Tujuan

Untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan selama lima tahun, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021– 2026, maka tujuan dari Rencana Strategis ini adalah :

- a. Menjabarkan kembali visi dan misi RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Menetapkan rencana perubahan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.

- c. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan selama 5 (lima) tahun mendatang.
- d. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA Dinas Ketahanan Pangan; dan
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut: :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. Maksud dan Tujuan;
- 1.3. Landasan Hukum;
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKABUMI

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi;
- 2.2. Sumber Daya;
- 2.3. Kinerja Pelayanan; dan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANGURUSAN

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN RENCANA KEUANGAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKABUMI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan dan Sub urusan penyuluhan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten sukabumi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Penanganan Bidang Ketahanan Pangan dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, yang kemudian terdapat perubahan berupa tidak adanya bidang penyuluhan melalui Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. Untuk menyesuaikan dengan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan yang termuat dalam Peraturan Bupati No. 76 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten;

- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas ; dan
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang tugasnya ;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Keuangan
 - 2. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Sumber Daya Ekonomi dan Pengendalian Kerawanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Sumber Daya Pangan
 - 2. Sub Koordinator Sumber Daya Ekonomi
 - 3. Sub Koordinator Pengendalian Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 2. Sub Koordinator Ketersediaan dan Akses Pangan; dan
 - 3. Sub Koordinator Cadangan Pangan Pemerintah.
- e. Bidang Keamanan Pangan, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - 2. Sub Koordinator Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan ; dan
 - 3. Sub Koordinator Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi

2.2.1 Sumber Daya Manusia

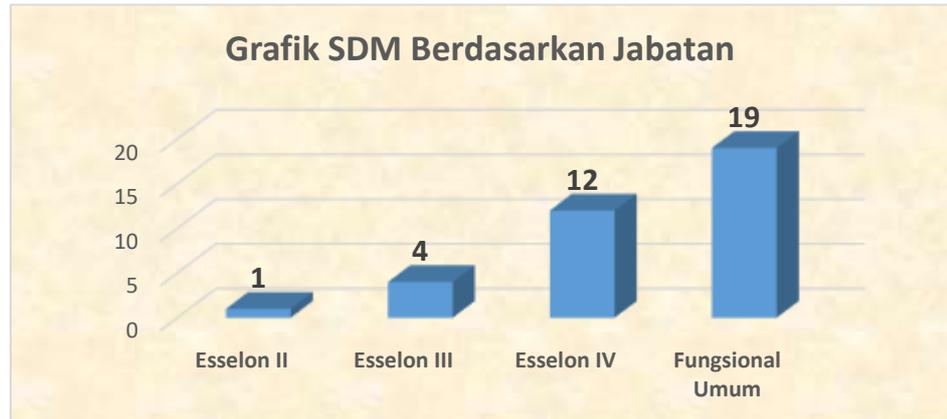
1. Berdasarkan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi per Mei Tahun 2021 sebanyak 36 orang. Rincian sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Jabatan

No.	Eselon/Non Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	12
4	Fungsional Umum	19
Jumlah		36

Sumber : Hasil Olahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2021



Gambar 2. Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Jabatan

Dari Gambar 2.2.1 terlihat bahwa Jumlah SDM yang mengisi jabatan struktural sebanyak 17 orang . Terdapat dua jabatan struktural yang kosong karena 1 orang pejabat meninggal dunia yaitu Sekretaris Dinas dan 1 orang memasuki masa pensiun yaitu Kepala Bidang Konsumsi. Dari 19 orang fungsional merupakan fungsional umum.

2. Berdasarkan Golongan

Tabel 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Golongan

No.	Golongan/Ruang Pangkat	Jumlah (Orang)
1	IVc	1
2	IVb	1
3	IVa	5
4	IIIId	6
5	IIIc	5
6	IIIb	6
7	IIIa	9
8	IIId	1
9	IIc	-
10	IIb	1
11	Ila	2
Jumlah		36

Sumber : Hasil Olahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2021



Gambar 3 Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Golongan

Pegawai yang paling banyak jumlahnya adalah pegawai golongan III yaitu mencapai 72,2% dari total pegawai. Pegawai Golongan IV sebagian besar merupakan pegawai struktural yang menjabat jabatan eselon IV, eselon III, dan eselon II. Masih terdapat pegawai golongan 2 sebanyak 4 orang yang merupakan Pengadministrasian umum.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Gedung Kantor				
	- Kantor Dinas	1	1	-	-
2	Kendaraan Dinas				
	- Roda Empat	8	6	-	-
	- Roda Dua	7	7	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi

Pelayanan publik yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi adalah sesuai dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan yang meliputi pelayanan bidang pangan dan bidang pertanian, meliputi ketersediaan dan distribusi, konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia, yang menjadi kewenangan Kabupaten, dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang menjadi dasar pelayanan publik yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi. Beberapa urusan Pemerintah Kabupaten Sukabumi,yaitu:

A. Urusan Pangan :

1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian :
 - Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
 - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
 - b. Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten/Kota.
 - c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3. Penanganan Kerawanan Pangan
 - a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan
 - b. Penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota.
 - c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. Keamanan Pangan
 - Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan pada tingkat outcome perangkat daerah berdasarkan permendagri No. 86 tahun 2017 adalah :

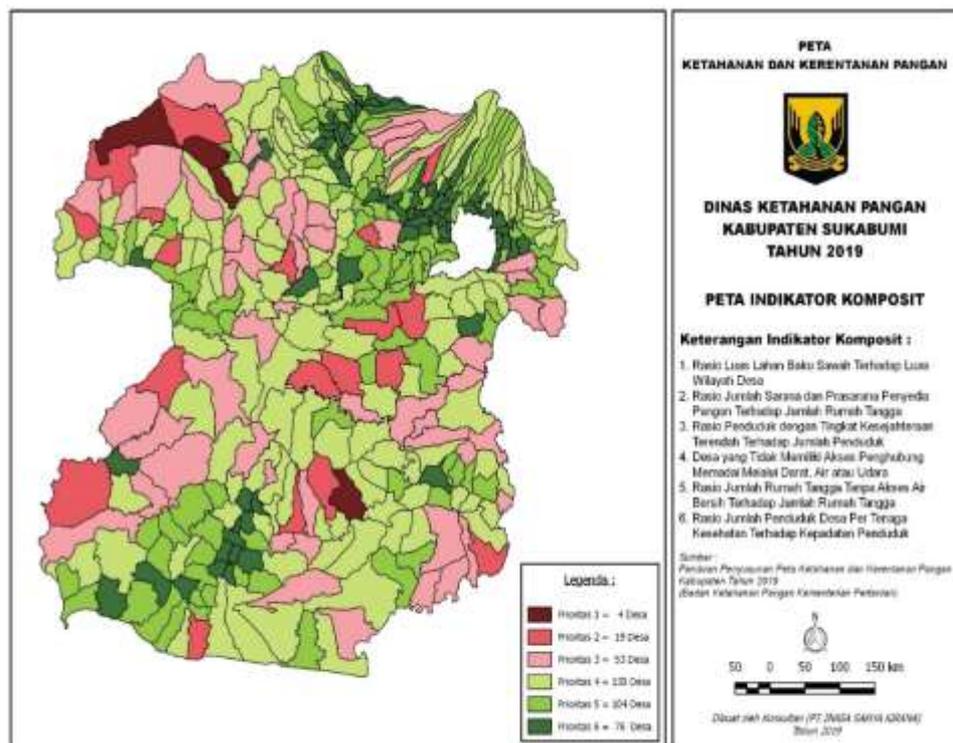
- a. Aspek kesejahteraan yang meliputi skor PPh, penguatan cadangan pangan dan penanganan daerah rawan pangan.
- b. Aspek pelayanan meliputi ketersediaan pangan utama, ketersediaan energi dan protein perkapita serta pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

Tabel 4 (T-C 23). Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang tertuang dalam Capaian Indikator Kinerja selama periode 2016-2021.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target	Target Renstra PD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Ketahanan Pangan																			
1. Persentase Penurunan Daerah Rentan Pangan	87	7	23	39	55	71	87	2	6	31	64	71	87	0,29	0,26	0,74	1,16	1,00	1,00
2. Peningkatan Cadangan Pangan	100	93,3	95,3	98,3	100	100	100	100	106	112	121,4	101	102	1,07	1,11	1,14	1,21	1,01	1,02
3. Peningkatan Ketersediaan Energi	2400	Na	Na	Na	2200	2300	2400	Na	Na	Na	2548	2668	2681	Na	Na	Na	1,16	1,16	1,12
4. Persentase Peningkatan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	82	Na	Na	Na	80	81	82	Na	Na	Na	76,9	85,4	87,3	Na	Na	Na	0,96,	1,05	1,07
5. Persentase Distribusi dan Akses	104	Na	Na	Na	104	104	104	Na	Na	Na	113,5	113,5	113,5	Na	Na	Na	1,09	1,09	1,09

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021 untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Ketahanan Pangan” belum semua indikator memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi capaian tahun 2020 dibandingkan target dari masing - masing indikator kinerja.

1. Realisasi kinerja untuk Penurunan daerah rentan rawan pangan pada tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) desa sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2016 sebanyak 2 (dua) desa, 2017 sebanyak 4 (empat) desa dan 2018 sebanyak 25 (dua puluh lima) desa, tahun 2019 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) desa dan tahun 2020 sebanyak 16 (enam belas desa). Sehingga realisasi penurunan daerah rentan rawan pangan sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 87 desa. Adapun data indicator kinerja Persentase Penurunan Daerah Rentan Pangan meliputi target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar 4. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kab. Sukabumi Tahun 2019

Tabel 5 . Indikator Kinerja Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rentan Pangan	16	16	100

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa, Persentase penurunan Daerah rentan rawan pangan pada tahun 2021 ini sebesar 100 % persentase ini diperoleh dari perhitungan jumlah realisasi tahun 2021 (16 desa) dibagi target 2021 (16 Desa) dikali 100%. Tinggi nya persentase penurunan daerah rentan pangan ini dikarenakan adanya berbagai intervensi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dalam upaya penurunan daerah rentan pangan dalam bentuk kegiatan antara lain : Kegiatan Penanganan Daerah Rentan Pangan, Pengembangan Usahan Pangan Masyarakat, Lembaga Distribusi Masyarakat, Warung Pangan, Kawasan Mandiri Pangan dan lain-lain. Untuk peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2018 dan 2019 hal ini karena adanya intervensi Dana Desa yang mulai digulirkan pertama kali pada tahun 2016 dan 2017 yang kemudian dirasakan besar daya ungkitnya terhadap penurunan daerah rentan pangan pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang diharapkan akan lebih meningkatkan daya ungkit pada tahun selanjutnya. Penurunan daerah rentan pangan merupakan penurunan terhadap masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter yang melibatkan permasalahan mengenai ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu.

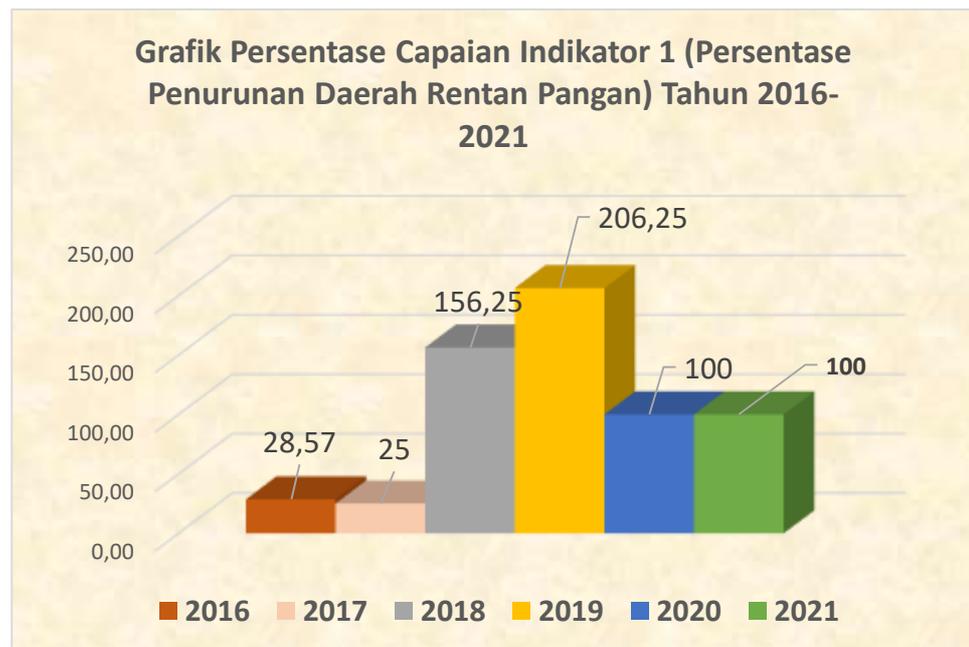
Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut. Sehingga dalam penanganannya memerlukan intervensi dari semua perangkat daerah dan masyarakat kabupaten Sukabumi. Realisasi yang dicapai terhadap persentase penurunan daerah rentan pangan juga dapat dilihat dari hasil Kajian Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau Kajian Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sukabumi pada Tahun 2015, Tahun 2017 dan Tahun 2019.

Hasil Kajian FSVA Tahun 2015 menggambarkan adanya Daerah Rentan Pangan sebanyak 87 Desa (sebagai Target RPJMD) yang diambil dari prioritas I sebanyak 52 Desa dan Prioritas II sebanyak 35 Desa, Kajian FSVA Tahun 2017 memberikan gambaran adanya Daerah Rentan Pangan sebanyak 81 Desa yang diambil dari prioritas I sebanyak 21 Desa dan Prioritas II sebanyak 60 Desa. Dalam hal ini terdapat penurunan daerah rentan pangan sebanyak 6 desa dari tahun 2016 ke tahun 2017. Sedangkan Kajian FSVA Tahun 2019 memberikan gambaran adanya Daerah rentan pangan sebanyak 23 Desa yang diambil dari prioritas I sebanyak 4 desa dan prioritas II sebanyak 19 Desa.

Tabel 6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan

INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Capaian											
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Persentase Penurunan Daerah Rentan Pangan	2	28,6	4	25	25	156,3	33	206,3	16	100	16	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 memiliki % capaian 100% dimana dari 16 desa target tercapai 16 desa, tahun 2020 sebesar 100% atau sejumlah 16 Desa rentan rawan pangan yang tertangani, tahun 2019 sebesar 206,25 % atau sejumlah 33 desa rentan pangan yang tertangani sedangkan tahun 2018 sebesar 156,25% atau sejumlah 25 desa rentan pangan yang tertangani dari masing-masing target 16 desa pada tahun 2018 dan tahun 2019. Untuk perbandingan capaian tahun 2016 s/d 2020 ini dapat digambarkan dengan grafik berikut ini.



Gambar 5. Grafik Persentase Capaian Indikator 1

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian tahun 2016 kurang dari target yang ditetapkan yaitu dari target 7 desa hanya 2 Desa yang mengalami penurunan desa rentan rawan pangan, sehingga persentasenya hanya 28,57% dari 100%. Begitupula tahun 2017 dari target 16 desa hanya 5 desa yang mengalami penurunan desa rentan rawan pangan, sehingga persentasenya hanya 25%. Sedangkan 2018 dan 2019 melebihi target yang ada,

dimana tahun 2019 lebih besar pencapaian targetnya dibanding tahun 2018, serta untuk tahun 2020 dan 2021 antara target dan capaian sesuai atau persentase pencapaiannya sebesar 100%. Pencapaian ini berdasarkan dari hasil kajian FSVA Tahun 2019 dimana terlihat tingginya persentase penurunan daerah rentan pangan yang sangat signifikan sebagai dampak terhadap intervensi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, Intervensi Dana Desa, dan juga intervensi dari berbagai perangkat daerah dan juga masyarakat kabupaten Sukabumi yang memiliki daya ungkit terhadap penurunan daerah rentan pangan di Kabupaten Sukabumi.

2. Realisasi Kinerja yang kedua adalah Peningkatan Cadangan Pangan, dimana Peningkatan cadangan pangan ini terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakatnya yang didalamnya pula terdapat cadangan pangan desa. Untuk cadangan desa pada tahun 2021 baru berupa Nota Dinas Pada Bupati dan Surat Kepada Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Tentang Peran serta Desa dalam Cadangan Pangan Daerah (Pengalokasian ADD/DD untuk Cadangan Pangan Desa), serta adanya Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diharapkan pada tahun selanjutnya terdapat peran serta desa untuk memperkuat peningkatan cadangan pangan Kabupaten Sukabumi. Adapun data indikator kinerja Peningkatan Cadangan Pangan meliputi target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Indikator Kinerja Peningkatan Cadangan Pangan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Peningkatan Cadangan Pangan	100	102	102

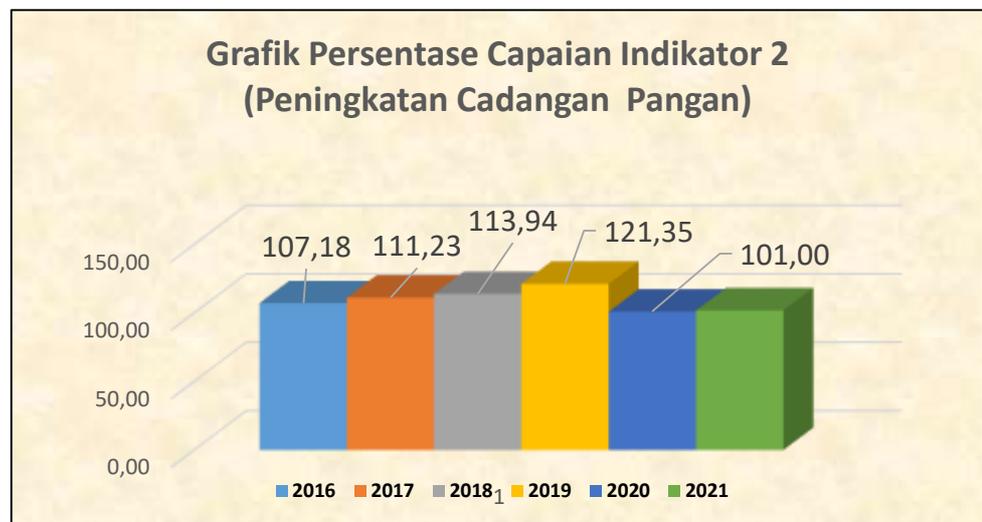
Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Peningkatan Cadangan Pangan pada tahun 2021 adalah sebesar 102% dimana terdapat peningkatan cadangan pangan sebanyak 102 ton. Jumlah cadangan pangan 102 ton ini berdasarkan cadangan pangan masyarakat yang ada di kelompok dalam kegiatan lumbung pangan masyarakat (LPM) yang terdiri dari 30 kelompok LPM dengan rata-rata ketersediaan cadangan sebanyak 4 ton per kelompok jadi 120 ton, dan untuk cadangan pangan pemerintah pada tahun 2021 hanya sebesar 51,35 ton dimana

1,354 ton adalah sisa cadangan pangan tahun sebelumnya serta 50 ton pengadaan tahun 2021 dengan cara pengadaan barang menggunakan jenis kontrak harga satuan.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Cadangan Pangan

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian											
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Peningkatan Cadangan Pangan	100	107,2	106	111,2	112	113,9	121,4	121,4	101	101	102	102

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian peningkatan cadangan pangan dari tahun ke tahunnya selalu meningkat hal ini dikarenakan untuk pemenuhan cadangan pangan ini selain cadangan pangan pemerintah juga di tunjang dengan cadangan pangan yang ada pada masyarakat. Untuk perbandingan capaian tahun 2016 s/d 2021 ini dapat digambarkan dengan grafik berikut ini.



Gambar 6. Grafik Persentase Capaian Indikator 2

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian indikator kinerja 2 (Peningkatan Cadangan Pangan) pada tahun 2016 adalah sebesar 107,18% (target 93,3 ton, realisasi 100 ton), Pada Tahun 2017 persentase capaian sebesar 111,23% (Target 95,3 ton, realisasi 106 ton) pada 2018 sebesar 113,94% (Target 98,3 Ton, realisasi 112 ton) pada tahun 2019 sebesar 121,35 % (Target 200 ton realisasi 121,35 ton), tahun 2020 persentasenya adalah sebesar 101 % (Target 100 ton, realisasi 101 ton) sedangkan tahun 2021 persentase

capaiannya adalah sebesar 102 % (Target 100 ton, realisasi 102 ton) ini menunjukkan adanya upaya pemenuhan dan peningkatan cadangan pangan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan cadangan pangan ini seperti kegiatan lumbung pangan masyarakat (LPM), pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) dan juga kegiatan lain baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari APBN dan lainnya. Walaupun Tahun 2020 dan 2021 ini jumlah cadangan pangan yang ada mengalami penurunan dari tahun 2019 hal ini dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 yang mengurangi jumlah cadangan pangan yang ada, namun masih dalam jumlah yang memadai serta sesuai dengan target peningkatan cadangan pangan tahun 2020 dan 2021.

3. Realisasi Kinerja yang ketiga adalah Peningkatan Ketersediaan Energi dengan satuan kkal/kap/tahun dimana realisasi peningkatan ketersediaan energy ini dapat digambarkan dengan angka ketersediaan energy kabupaten Sukabumi dari hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2021. Dalam neraca bahan makanan (NBM) ini melibatkan pengadaan atau penyediaan pangan (Produksi, ekspor, impor, dan perubahan stok), penggunaan pangan dan factor konversi pangan. untuk data ekspor impor pangan menggunakan estimasi ekspor impor pangan yang diperoleh dari selisih antara konsumsi pangan dengan data produksi pangan. konsumsi pangan yang digunakan adalah jumlah dari jenis pangan yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Sukabumi pada data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Adapun data indicator kinerja Peningkatan Ketersediaan Energi meliputi target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Indikator Kinerja Peningkatan Ketersediaan Energi Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketersediaan Energi	2400	2681	111,7

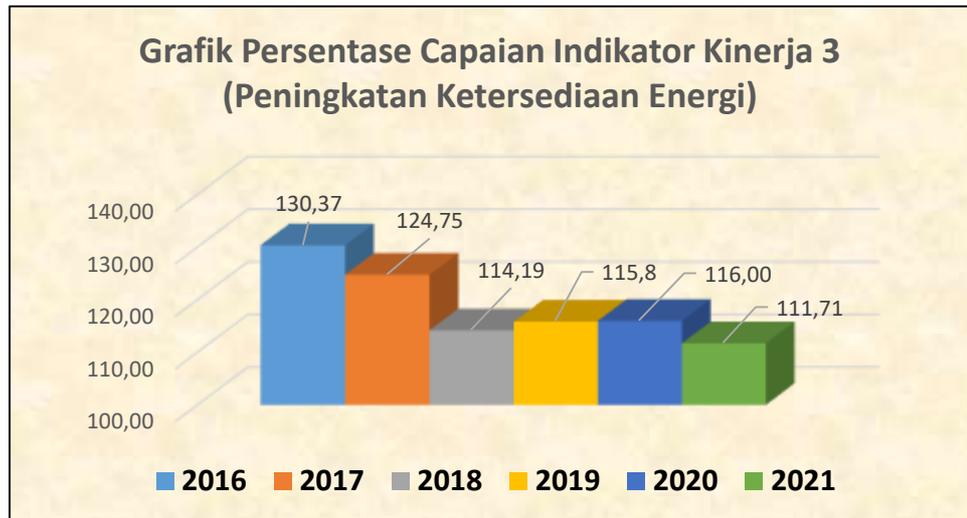
Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi peningkatan ketersediaan energy sebesar 2681 kkal/kap/hari dengan persen realisasi sebesar 111,7%, besarnya persentase realisasi ini dikarenakan adanya dukungan berbagai kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan diantaranya adalah Kegiatan Pengadaan cadangan pangan pemerintah, Lembaga Distribusi Masyarakat, Pengembangan

usaha pangan masyarakat, Penyusunan analisis neraca bahan makanan dan lain-lain. Selain itu juga dari tingginya ketersediaan energy dari 9 kelompok pangan terutama dari kelompok padi-padian sebesar 1666 kkal/kap/hari, umbi-umbian sebesar 60 kkal/kap/hari dari pangan hewani sebesar 360 kkal/kap/hari, dari minyak dan lemak 282 kkal/kap/hari, buah/biji berminyak sebesar 2 kkal/kap/hari, dari kacang-kacangan 86 kkal/kap/hari, dari gula 58 kkal/kap/hari dari sayur dan buah-buahan sebesar 167 kkal/kap/hari dan dari kelompok pangan lainnya hingga mencapai 2681 kkal/kap/hari. Data ketersediaan energi ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Ketersediaan Energi dari Neraca Bahan Makanan Tahun 2021

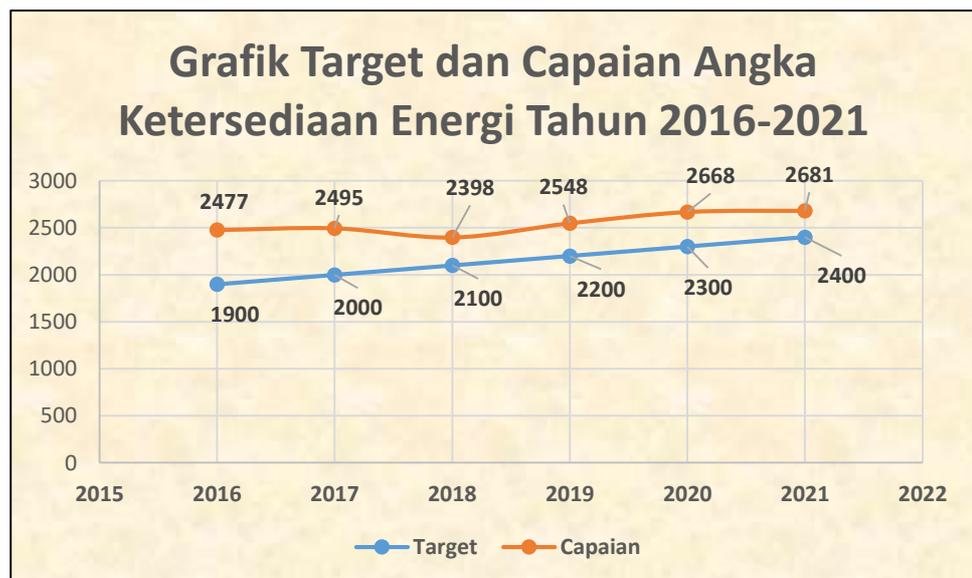
No	Kelompok Pangan	Gram/ Kap/Hari	Energi		
			kkal	%	% AKE*)
1	Padi-padian	470,9	1666	62,2	69,4
2	Umbi-umbian	60	60	2,2	2,5
3	Pangan Hewani	360	360	13,4	15,0
4	Minyak dan Lemak	282	282	10,5	11,8
5	Buah/Biji Berminyak	0,8	2	0,1	0,1
6	Kacang-kacangan	86	86	3,2	3,6
7	Gula	15,7	58	2,1	2,4
8	Sayur dan Buah	167	167	6,2	7,0
9	Lain-lain	0	0	0	0
	Total		2.681	100,0	111,7

Tingginya ketersediaan energi dari kelompok padi-padian ini juga di gambarkan dengan tingginya tingkat produksi padi-padian terutama beras sebesar 550.195 ton dengan tingkat konsumsi beras sebesar 345.876 ton sehingga setelah dikurangi dengan tingkat konsumsi dan bagian tercecer lainnya, memberikan kondisi surplus beras sebesar 194.831 ton pada tahun 2021. Kondisi surplus pada beras ini juga memberikan dampak ketersediaan energy yang sangat besar di Kabupaten Sukabumi. Untuk perbandingan capaian indicator kinerja No.3 tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 7. Grafik Persentase Capaian Indikator Kinerja 3

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian indikator kinerja 3 (Peningkatan Ketersediaan energi) pada tahun 2016 sebesar 130,37% (Target 1900 kkal/kap/hari, Realisasi 2477 kkal/kap/hari), pada tahun 2017 sebesar 124,75% (Target 2000 kkal/kap/hari, realisasi 2495 kkal/kap/hari), pada tahun 2018 sebesar 114,19% (Target 2100 kkal/kap/hari, realisasi 2398 kkal/kap/hari) pada tahun 2019 sebesar 115,8% (Target 2200 kkal/kap/hari, realisasi 2548 kkal/kap/hari), pada tahun 2020 sebesar 116% (Target 2300 kkal/kap/hari, realisasi 2668 kkal/kap/hari), dan pada tahun 2021 sebesar 111,7% (Target 2400 kkal/kap/hari, realisasi 2681 kkal/kap/hari).



Gambar 8. Grafik Target dan Capaian Angka Ketersediaan Energi 2016-2021

Grafik memperlihatkan seperti penurunan capaian, namun sebenarnya terdapat peningkatan yang signifikan jika dilihat dari peningkatan ketersediaan energi di tiap tahunnya, hal ini dikarenakan angka penyebut (Target ketersediaan energi) tiap tahun yang meningkat 100 kkal/kap/hari, sehingga seakan-akan capaian ini mengalami penurunan, namun sebenarnya adalah mengalami peningkatan. Peningkatan ketersediaan energi ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan ketersediaan energi ini seperti kegiatan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang menghasilkan rekomendasi untuk dinas teknis dalam memenuhi ketersediaan energi yang masih rendah di kabupaten Sukabumi pada tahun sebelumnya, diantaranya adalah rekomendasi untuk Dinas Pertanian untuk meningkatkan ketersediaan kelompok pangan kacang-kacangan dan umbi-umbian serta rekomendasi untuk Dinas Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk kelompok pangan hewani. Selain itu juga karena adanya kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan seperti Pembangunan Lumbung Pangan, Pengadaan Cadangan Pangan, Desa Mandiri Pangan serta kegiatan lainnya baik di Dinas Ketahanan Pangan maupun di perangkat daerah lainnya yang secara tidak langsung mendukung terhadap peningkatan ketersediaan energi di Kabupaten Sukabumi.

4. Realisasi Kinerja yang ke-4 adalah Persentase Peningkatan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan yang di terjemahkan ke dalam persentase perolehan skor pola pangan harapan (Skor PPH) yang merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat konsumsi pangan yang berfungsi untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan dan menilai tingkat keanekaragaman dan mutu gizi konsumsi pangan. Sedangkan untuk Persentase keamanan pangan yang merupakan gambaran tingkat keamanan pangan di masyarakat yang mengarah ke keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sebagai kewenangan Dinas keamanan Pangan dimana jumlah sampel pangan yang negative berbading total sampel pangan dikali 100. Adapun data indikator kinerja Persentase Peningkatan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan meliputi target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Panganekaragaman dan Keamanan Pangan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Peningkatan Panganekaragaman dan Keamanan Pangan	82	87,3	106,46

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi persentase peningkatan panganekaragaman dan keamanan pangan (Skor PPH) tahun 2021 sebesar 87,3 dari target 82 dengan persen realisasi 106,46 Persen. Realisasi diatas 100% ini menggambarkan tercapainya indikator kinerja persentase peningkatan panganekaragaman dan keamanan pangan, namun jika melihat komposisi ketercapaian skor pph dari 9 kelompok pangan masih terdapat gap yang cukup signifikan dibandingkan nilai ideal dari skor PPH. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel hasil analisis pola pangan harapan tahun 2021 :

Tabel 12. Data Hasil Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2021

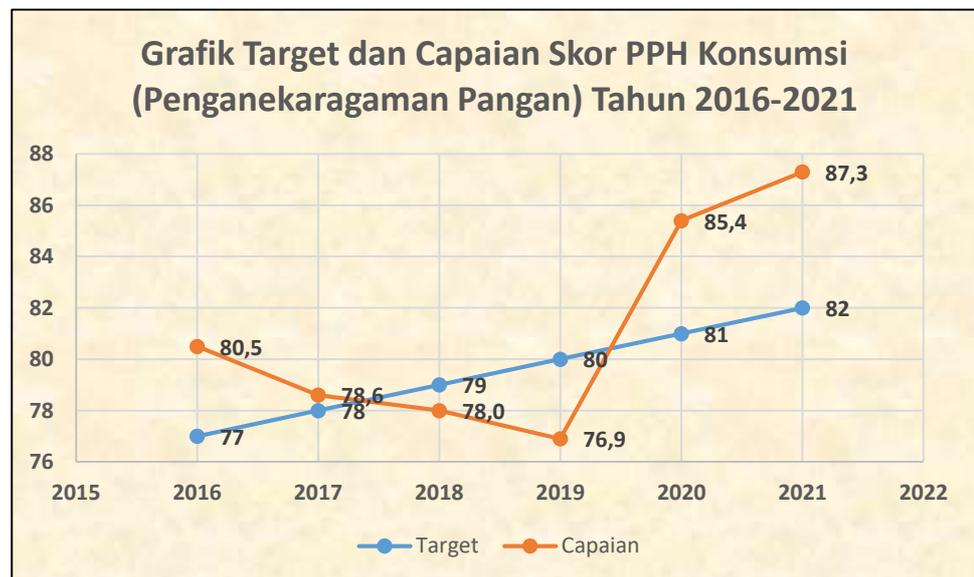
No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		
		Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	38,3	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,4	2,5	1,4
3	Pangan Hewani	22,9	24,0	22,9
4	Minyak dan Lemak	6,4	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,2	1,0	0,2
6	Kacang-kacangan	5,6	10,0	5,6
7	Gula	1,3	2,5	1,3
8	Sayur dan Buah	25,9	30,0	25,9
9	Lain-lain	-	-	-
Total			100,0	87,3

Dari tabel di atas dapat dilihat sebaran skor PPH pada 9 kelompok bahan pangan belum sesuai dengan skor ideal sebesar 100 atau dari skor PPH Target sebesar 82 untuk tahun 2021. Hal ini dikarenakan masih adanya konsumsi pangan yang kurang dari beberapa kelompok pangan berupa sayur dan buah dengan skor 25,9 dari skor ideal 30, konsumsi pangan hewani sebesar 22,9 dari skor ideal 24,0, konsumsi kacang-kacangan sebesar 5,6 dari skor ideal 10, konsumsi umbi-umbian sebesar 1,4 dari skor ideal 2,5, konsumsi buah/biji berminyak sebesar 0,2 dari skor ideal 2,5 dan dari konsumsi gula sebesar 1,3 dari skor ideal 2,5. Tidak tercapainya

skor pola pangan harapan ini dikarenakan masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras, masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, sayur, buah, serta kacang-kacangan, dan pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah. Untuk meningkatkan penganeekaragaman pangan. Untuk perbandingan capaian indikator kinerja No.4 tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 9. Grafik persentase capaian indikator kinerja no. 4



Gambar 10. Grafik target dan capaian skor PPH konsumsi

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian indikator kinerja 4 (Persentase Peningkatan Penganeekaragaman dan Keamanan Pangan) pada tahun 2016 sebesar 104,55% (Target 77, realisasi 80,5), tahun 2017 sebesar 100,77% (Target 78, realisasi 78,6), tahun 2018 sebesar 98,73 % (Target 79, realisasi 78,0) Tahun 2019 sebesar 96,13% (Target 80, realisasi 76,9), tahun 2020 sebesar 105,43

% (Target 1, realisasi 85,4), dan pada Tahun 2021 sebesar 106,46% (Target 82, Realisasi 87,3) ini menunjukkan adanya peningkatan capaian sebesar 1,9 point dari skor PPH tahun sebelumnya atau pencapaian nilai skor 5,3 point dari target tahun 2021. hal ini merupakan adanya kegiatan-kegiatan penunjang yang ada di Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2019-2021, diantaranya adalah Kegiatan Percepatan Penganekaragaman konsumsi Pangan (P2KP), dan Analisis Pola Pangan Harapan, namun dalam realisasinya belum dapat mendongkrak pencapaian skor PPH secara optimal dikarenakan pola pangan harapan ini terkait dengan kebiasaan atau perilaku konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA), dimana perilaku B2SA belum secara menyeluruh diketahui dan dipahami oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Pada Tahun anggaran 2020, untuk peningkatan keamanan pangan Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Sukabumi melakukan uji keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, yaitu pemeriksaan keamanan pangan segar asal tumbuhan dengan mengecek bakteri *Listeria monocytogenes* Berdasarkan surat pemberitahuan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Nomor B-305/KN.230/J/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 Perihal Pengawasan PSAT dan Surat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Nomor 526/1930/KSDM Tanggal 29 Juni 2020 Perihal peningkatan pengawasan PSAT untuk Komoditas pangan Jamur Enoki. Pengambilan sampel dilakukan di beberapa titik yaitu Palabuhanratu meliputi Fany Frozen Food dan Yogya Departemen Store serta di Cibadak yaitu Ramayana Cibadak. Adapun data pengujian keamanan pangan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 13. Hasil Uji Keamanan Pangan Dinas ketahanan Pangan Tahun 2020

No.	Jenis Sampel	Lokus Sampel	Uji Yang dilakukan	Jumlah Sampel	Hasil Uji	
					Positif	Negatif
1	Jamur enoki	Fany Frozen Food Palabuhanratu	<i>Bakteri L. monocytogenes</i>	1	0	1
2	Jamur Enoki	Yogya Departement store Palabuhanratu	<i>Bakteri L. monocytogenes</i>	1	0	1
3	Jamur Enoki	Ramayana Cibadak	<i>Bakteri L. monocytogenes</i>	1	0	1
Total Sampel Uji				3		
Total Sampel Positif					0	
Total Sampel Negatif (Total Sampel – Sampel Positif)						3
Persentase Keamanan PSAT (Sampel Negatif/Total Sampel x 100%)						100

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase keamanan Pangan segar asal tumbuhan (PSAT) tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Dimana nilai persentase ini termasuk persentase yang optimal dari segi ketercapaian kinerja, namun tentunya diharapkan jumlah sample yang mewakili setiap komoditas pangan agar dapat mewakili keamanan PSAT. Terbatasnya jumlah sample pangan yang diuji ini dikarenakan pada tahun 2020 ini anggaran untuk pengujian keamanan pangan mengalami refocussing akibat efisiensi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Pentingnya pengujian keamanan pangan ini dikarenakan pangan merupakan sesuatu yang akan dikonsumsi oleh masyarakat yang seharusnya bebas dari bahaya fisik, kimia dan juga biologi. Untuk cemaran berupa kandungan bakteri *Listeria monocytogenes* merupakan cemaran yang termasuk kategori cemaran biologi dimana keberadaan bakteri ini dalam pangan yang kita konsumsi dapat mengakibatkan kondisi yang membahayakan dengan gejala umum seperti demam, nyeri otot, disertai mual atau diare hingga menyebabkan kematian. Sedangkan cemaran berupa pestisida merupakan cemaran yang masuk dalam kategori cemaran kimia, karena berasal dari bahan kimia yang sengaja digunakan pada saat penanaman. Pada tahun 2020 pengujian keamanan pangan masih terbatas jumlah sampel yang dilakukan pengujian, diharapkan di tahun berikutnya terdapat penambahan anggaran yang memungkinkan untuk pengujian PSAT lebih banyak yang mewakili kondisi yang ada di Kabupaten Sukabumi.

5. Realisasi Kinerja yang kelima adalah persentase distribusi dan akses pangan, dimana menggunakan perhitungan harga gabah kering panen (GKP) kabupaten dibagi dengan harga pokok pembelian pemerintah (HPP) nasional dikali 100%. Untuk GKP Kabupaten Tahun 2019 adalah Rp. 4200/Kg dan untuk HPP Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah Rp. 3700 /Kg ($4200/3700 \times 100$) sehingga untuk tahun 2021 di peroleh Realisasi sebesar 113,51% sehingga persentase Realisasi untuk Distribusi dan akses pangan adalah sebesar 109,15 % (Realisasi dibagi target tahun 2021). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Indikator Kinerja Persentase Distribusi dan Akses Pangan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI
5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Distribusi dan Akses Pangan	104	113,51	109,15

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa % Realisasi pada tahun 2021 sebesar 109,15%, besarnya persentase realisasi ini dikarenakan untuk harga pembelian pokok pemerintah (HPP) Nasional untuk GKP di Petani masih pada angka Rp. 3700/Kg sesuai dengan intruksi Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Penggunaan perhitungan di atas sebagai indikator kinerja Persentase Distribusi dan akses pangan di Kabupaten Sukabumi setidaknya dapat mewakili kondisi optimal atau tidaknya distribusi dan akses yang ada karena berkaitan dengan mudah dan tidaknya serta merata atau tidaknya pangan utama yang ada di Kabupaten Sukabumi sebagai tolak ukur untuk keterjangkauan akses dan distribusi untuk pangan lainnya. Untuk perbandingan capaian indikator kinerja No.5 tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 11. Grafik persentase capaian indicator kinerja no. 5

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian indikator kinerja 5 (Persentase Distribusi dan Akses Pangan) pada tahun 2016 sebesar 104% (Target 104%, Realisasi 108%), tahun 2017 sebesar 106,5% (Target 104%, realisasi 111%), dan pada tahun 2018 s/d 2021 sebesar 109,1% (Target 104%, realisasi 113,5%),

untuk 3 tahun terakhir ini menunjukkan capaian persentase yang sama atau konstan yang menggambarkan adanya kestabilan harga (dimana harga GKP Kabupaten pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 pada harga Rp. 4.200,-) sebagai dampak dari meratanya distribusi pangan dan mudahnya akses pangan untuk masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Ketercapaian indicator kinerja ini tidak terlepas oleh adanya kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan yang mendukung terhadap capaian diantaranya adalah Kegiatan Gudang Distribusi Pangan, Pendampingan LDPM, Penguatan LDPM, Pendampingan PUPM, Lembaga Akses pangan Masyarakat, Analisis Akses Pangan, Pemantauan harga dan kegiatan di bidang lainnya yang memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung. Serta dukungan lintas perangkat daerah dan lintas sector sebagai pendukung ketercapaian indicator ini (dukungan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, dll).

Tabel 15. (T-C 24). Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi

Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun				
2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Dalam jutaan					Dalam jutaan				
7.281,5	18.911,4	31.733,1	16.822,5	8.644,6	7.208,2	16.448,3	31.035,2	13.057,5	6.748,5

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Persen (%)					satuan	
98,99	86,98	97,80	77,62	78,07	0,3	0,2

Target kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 16 . Target Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target						Target Akhir Renstra (2026)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Skor PPH Ketersediaan	92,8	93,3	93,8	94,3	94,8	95,3	95,8	95,8
	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	-	14,2	12,5	11,1	10,0	18,18	15,38	81,46
	Persentase Cadangan Pangan yang dikelola	-	23,37	25,49	31,87	38,24	44,61	50,98	50,98
	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	-	14,47	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	100
	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	-	100	100	100	100	100	100	100

Fungsi indikator kinerja tingkat konsumsi pangan energi dan protein adalah bagaimana mempertahankan konsumsi energi dan protein masyarakat pada taraf ideal antara 2100 kkal/kap/hr dan 57 gr/kap/hr. Sedangkan karakter indicator pada kinerja pelayanan keamanan pangan segar asal tumbuhan, ini cukup dinamis karena suatu waktu bisa naik turun tergantung kepada pengawasan dilapangan, sosialisasi terhadap pelaku usaha dan kesadaran dari masyarakat. Kondisi ini perlu terus dipertahankan yang bertujuan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat atau konsumen.

Indikator Skor PPH Ketersediaan menilai jumlah dan komposisi kelompok pangan utama atau pola ketersediaan pangan yang didasarkan pada sumbangan

energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolute maupun relative). Ketersediaan diharapkan sampai tingkat rumah tangga minimal 2400 kkal/kapita/hari dan protein 63 gram/kapita/hari, sehingga ketersediaan Skor PPH dalam tarap yang ideal.

Umumnya karakter dari pemenuhan dukungan manajemen perkantoran merupakan pelayanan dasar yang cukup dinamis oleh karena sesuai kebutuhan, siutasi dan kondisi di lapangan dan anggaran yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah tingkat efesiensi dan efektivitas anggaran terhadap kebutuhan pelayanan dasar tersebut dalam mendukung program dan kegiatan prioritas.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi:

1. Masih banyak wilayah yang rentan rawan pangan;
2. Kurangnya diversifikasi Pangan dengan bahan pangan lokal;
3. Jaringan distribusi dan aksesibilitas pangan belum merata;
4. Kurangnya sinergi lintas sektoral dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan;
5. Pola konsumsi makan belum memenuhi syarat Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

Sedangkan peluang Dinas Ketahanan Pangan dalam mengembangkan pelayanan adalah :

1. Pemasok pangan bagi wilayah terdekat (Jakarta, Bogor, Depok dll)
2. Konsumen pangan cukup tinggi
3. Daya saing daerah yang mampu menarik investasi.
4. Daya tarik pariwisata agribisnis bagi wisatawan asing dan domestik
5. Potensi Pengembangan Wilayah agribisnis

Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi cukup tinggi dengan laju pertumbuhan penduduk Sukabumi per tahun akan mendorong permintaan kebutuhan pangan per kapita terus meningkat didukung pergeseran meningkatnya pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat. Pada sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap masalah

kerawanan pangan masih merupakan kendala. Penyebab utama kerawanan pangan dan kemiskinan adalah keterbatasan keterampilan yang dikuasai, sehingga kesulitan untuk memasuki lapangan kerja, serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan usaha. Masalah kemiskinan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena itu harus ada upaya perbaikan dan peningkatan kemampuan masyarakat miskin. Di antaranya melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan lain-lain. Jika upaya tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan masyarakat miskin tersebut akan semakin terpuruk dan semakin menderita.

Secara umum potensi dan peluang dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, adalah besarnya jumlah penduduk sebagai pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi nasional. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi merupakan penunjang bagi efektivitas manajemen pembangunan ketahanan pangan, yang juga menunjang pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Di sisi ketersediaan pangan, selain masih tersedia sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan, juga tersedia teknologi untuk meningkatkan produksi bahan pangan primer maupun olahan. Adapun peluang pengembangan sistem distribusi pangan ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan alat transportasi yang apabila didayagunakan dapat membuka keterisolasian daerah terpencil.

Di bidang konsumsi, potensi peningkatan juga ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi, kegiatan promosi dan advokasi, serta dukungan organisasi masyarakat sebagai infrastruktur sosial yang membantu proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat. Penduduk ini juga merupakan agen pelaku usaha di bidang pangan yang menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional. Kegiatan ekonomi pangan masyarakat memiliki peran penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan rekayasa teknologi informatika untuk pengembangan sistem dan jaringan data dan informasi sangat menunjang dalam pemantapan ketahanan pangan. Informasi yang di susun di antaranya mengenai peta-peta produksi, distribusi, konsumsi, dan sistem deteksi dini kerawanan pangan yang terkoneksi antar daerah dan dengan pusat.

Ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi menjadi isu yang sangat mendalam. Keterkaitan antar sektor merupakan kunci dari isu tersebut. Menggunakan istilah *from farm to table* atau dapat diartikan dari ladang hingga ke meja makan dapat mengilustrasikan keterpaduan antar sektor yang ada untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi. Keterpaduan tersebut dapat dilihat mulai dari produksi bahan pangan yang meliputi pertanian, peternakan dan kelautan perikanan lalu distribusi

pangan yang mencakup logistik, perdagangan dan transportasi hingga sektor jasa yang berkaitan dengan pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan memiliki peran yang strategis untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

Kabupaten Sukabumi yang merupakan kabupaten terluas di Jawa Barat memiliki potensi produksi yang sangat tinggi. Hal tersebut didukung dengan data yang di keluarkan oleh BPS bahwa salah satu penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sukabumi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun, dibalik tingginya share pertanian terdapat beberapa kondisi yang harus mendapat perhatian bersama yakni stunting. Stunting selayaknya merupakan dampak dari masih belum optimalnya ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan publikasi Kementerian Pertanian, dari tahun 2018 hingga tahun 2020 Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan peringkat Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari Kabupaten se-Indonesia. Pada tahun 2018, IKP Kabupaten Sukabumi berada pada posisi ke-181 dari 416 Kabupaten di Indonesia, dan menjauh pada tahun 2020 menjadi peringkat ke-198.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKABUMI

Tema pembangunan Kabupaten Sukabumi berpedoman terhadap prioritas pembangunan daerah dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi Covid-19 untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan. Adapun tema tersebut adalah “Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi” yang terbangun dalam sistem pusat logistik ketahanan pangan pada simpul pangan dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu :

1. Produksi daya saing
2. Koordinasi produksi dan pasar pengguna serta
3. Akses pangan masyarakat

Pengembangan pusat logistik pangan daerah melalui pendekatan simpul pangan (*Food Hubs*) merupakan sistem rantai pasok pangan harapan yang terstruktur mulai dari produksi sebagai pasokan, pengeluaran dan pasar. Latar belakang rantai pasok pangan ini adalah :

1. Ketersediaan pangan yang tidak stabil (Perspektif Konsumen)
2. Rendahnya kapasitas petani kecil untuk memenuhi pasar agar pasokan dan harga stabil (perspektif produsen).
3. Ketiadaan sistem produksi kolektif, ketidaksesuaian manajemen pasca panen, transaksi individual, rendahnya akses ke pasar dan akses pembiayaan dan ketiadaan pendampingan intensif.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan meliputi ketersediaan dan distribusi, konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Kabupaten, melaksanakan tugas melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir secara garis besar dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi. Beberapa kendala dan hambatan dalam meningkatkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan adanya keterbatasan anggaran/dana untuk penyediaan/pengadaan cadangan pangan pemerintah. Kenaikan

konsumsi beras terjadi karena meningkatnya laju produksi padi di Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2021) dan semua pemanfaatan lahan pada prioritas komoditi pajale, sehingga produksi komoditi kelompok pangan lainnya belum begitu optimal, hal ini diprediksi berpengaruh terhadap konsumsi karbohidrat (beras), sehingga tidak tersedianya lahan untuk penanaman tanaman diluar padi, karena lahan yang ada dimanfaatkan untuk program pemerintah Pajale (Padi, Jagung, Kedelai). Alokasi intervensi/penanganan desa rawan pangan berdasarkan tingkat prioritas desa rentan rawan pangan di kabupaten Sukabumi, dimana intervensi dilakukan di prioritas 1, dilanjutkan ke prioritas 2.

Perumusan permasalahan dalam pemetaan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perumusan masalah pokok, masalah masalah dan akar masalah yang akan menjadi perumusan terhadap tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sukabumi.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Kualitas sumberdaya manusia	Kurangnya diversifikasi pangan dengan bahan pangan lokal
2	Kesejahteraan masyarakat	Kemiskinan	Masih banyak wilayah yang rentan rawan pangan
3	Akuntabilitas kerja	Program yang belum optimal	Jaringan distribusi dan aksesibilitas pangan belum merata (analisis akses pangan seperti nasional) Kurangnya sinergi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan
4	Belum tercapainya skor pola panganharapan yang ideal.	Masih rendahnya konsumsi panganekeagaman pangan masyarakat.	Belum optimalnya kesadaran konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, masih ada daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (stunting).
5	Masih kurangnya ketersediaan pangan dalam mencapai Skor PPH tingkat Ketersediaan untukkonsumsi perkapita perhari masyarakat Kabupaten Sukabumi	Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi	Alih fungsi lahan pertanian, tingginya pembangunan sektor non pertanian (pariwisata, perhotelan, jasa transportasi, industri non pangan, dll) tidak diimbangi dengan pembangunan pertanian yang tinggi pula.
6	Belum idealnya konsumsi energi danprotein sesuai harapan.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pola konsumsi kandungan energi dan protein serta kualitas bahan pangan produk pertanian yang rendah Belum memenuhi standar.	Konsumsi energi telah melebihi standar Angka Kecukupan Gizi untuk tingkat nasional rata-rata adalah 2100 kkal/orang/hari dan konsumsi protein telah melebihi standar Angka Kecukupan Gizi untuk tingkat nasional rata-rata (57gram/kap/hari)
7	Belum terjaminnya keamanan pangan segar asal tumbuhan yangdi konsumsi masyarakat.	Beredarnya pangan segarasal tumbuhan terpaparbaham racun cemar (pestisida, formalin dan bakteri fatogen yangberbahaya bagi tubuh.	Kurang terawasinya pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan di masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Pernyataan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 merupakan manifestasi cita-cita dari mimpi kepala daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi. Visi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dijadikan petunjuk arah bagi pembangunan daerah sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”.

Pernyataan visi Kabupaten Sukabumi di atas memiliki makna sebagai berikut:

1. Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif

Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa.

2. Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum atas usaha-usaha yang akan ditempuh dalam mewujudkan pernyataan visi. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah,

maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing,
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan,
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.

Sejatinya, manusia memegang peran dan menjadi motor penggerak semua komponen yang ada di dunia, sehingga manusia adalah ujung tombak dalam pengelolaan sumberdaya alam secara keseluruhan. Untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, maka perlu dilakukan perubahan ke arah yang positif dengan membangun sumberdaya manusia yang handal dalam hal ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa/Allah SWT, norma sosial dan budaya lokal serta mampu mencari strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Sumber daya manusia berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sumberdaya lainnya demi pencapaian visi yang maksimal.

Misi 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan.

SDM yang handal dan berdaya saing diharapkan mampu mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi unggulan daerah khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, namun tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang saat ini paling optimal memberikan dampak turunan positif di berbagai aspek yang ujungnya pada pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian dengan penekanan pada agrobisnis dan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini akan membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.

Pembangunan sumberdaya manusia, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dipercepat jika akses penghubung antar wilayah terbangun dengan baik. Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dengan topografi

yang sangat beragam, menjadi tantangan dalam peningkatan konektivitas. Konektivitas wilayah ini tidak hanya terkait infrastruktur jalan, namun juga teknologi. Pembangunan infrastruktur baik hardware (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) maupun software (teknologi informasi dan komunikasi) akan membuka konektivitas antar wilayah di daerah. Konektivitas yang mudah dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing usaha dan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi baru. Kerja sama antar wilayah juga akan menjadi mudah, sehingga pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.

Pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang maju, inovatif, sejahtera lahir batin diperlukan adanya reformasi birokrasi di tataran pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan good governance, sedangkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan clean government. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mampu membaca kebutuhan masyarakat. Inovasi pelayanan publik akan ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan dunia dengan mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (e-government).

PROGRAM KERJA

Sebagai upaya mewujudkan misi-misi di atas, disusunlah program- program kerja utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

BIDANG EKONOMI

Digitalisasi Pertanian, Peternakan, kelautan dan perikanan (4 sektor)

BIDANG INFRASTRUKTUR

a. Pengembangan Infrastruktur Pertanian di Kawasan LP3B (47 Kecamatan)

Tabel 18 . Telaah Visi, Misi, dan Program Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

No	Visi/Misi/ Program Kerja	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
	<p>Visi: “ Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”</p> <p>Misi: “Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan”.</p> <p>Prioritas Pembangunan Ekonomi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Komoditas Unggulan melalui Hilirisasi dan Perluasan Akses Pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah 2. Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan <p>Program Kerja: 100 Hari Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalisasi Pertanian, Peternakan, kelautan dan perikanan (4 sektor) 2. Pengembangan Infrastruktur Pertanian di Kawasan LP3B 	<p>Tugas: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.</p> <p>Fungsi: Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi DKP mempunyai fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan daerah di bidang kesekretariatan, di bidang penyelenggaraan ketahanan pangan, di bidang penyelenggaraan kedaulatan dan kemandirian pangan, dan di bidang pengawasan dan pembinaan mutu serta keamanan pangan segar asal tumbuhan dan pengendalian kerawanan pangan ; b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesekretariatan, di bidang penyelenggaraan ketahanan pangan, di bidang penyelenggaraan kedaulatan dan kemandirian pangan, dan di bidang pengawasan dan pembinaan mutu serta keamanan pangan segar asal tumbuhan dan pengendalian kerawanan pangan; c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan, di bidang penyelenggaraan ketahanan pangan, di bidang penyelenggaraan kedaulatan dan kemandirian pangan, dan di bidang pengawasan dan pembinaan mutu serta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya ketersediaan energy dan protein. 2. Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah. 3. Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman 4. Masih adanya pangan segar tidak beredar di masyarakat 5. Perlunya jaminan mutupada pangan segar asal tumbuhan 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya daerah rawan pangan 2. Kebiasaan/ pengetahuan masyarakat terhadap pangan yang B2SA <p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya potensi sumber daya yang dapat diberdayakan (SDA, SDM, permodalan) 2. Tersedianya inovasi dan teknologi yang dapat diterapkan untuk pengembangan usaha

		<p>kemanan pangan segar asal tumbuhan dan pengendalian kerawanan pangan;</p> <p>d. peningkatan kualitas SDM di bidang kesekretariatan, di bidang kesekretariatan, di bidang penyelenggaraan ketahanan pangan, di bidang penyelenggaraan kedaulatan dan kemandirian pangan, dan di bidang pengawasan dan pembinaan mutu serta kemanan pangan segar asal tumbuhan dan pengendalian kerawanan pangan;</p> <p>e. pembinaan administrasi di lingkungan Dinas</p> <p>f. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;</p> <p>g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p> <p>h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;</p> <p>i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan</p> <p>j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.</p>		
--	--	--	--	--

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 2 yaitu “Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan”. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka peningkatan produktivitas serta daya saing ekonomi yang berbasis kepada agrobisnis dan pariwisata yang berkelanjutan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Pelaksanaan misi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang melibatkan kelompok tani, kelompok wanita tani dan kelompok masyarakat lainnya, kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi yang didukung reformasi agraria.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal. Antara lain dilakukan dengan pengembangan sumber pangan lokal, pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan pangan, penguatan kelembagaan pangan, jaringan distribusi dan sistem logistik daerah, pengembangan akses pangan, pembinaan lumbung pangan masyarakat, penyediaan cadangan pangan pemerintah, pengembangan pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal, promosi penganekaragaman pangan, pengawasan keamanan pangan, peningkatan kerjasama dan informasi keamanan pangan, pembinaan kelembagaan keamanan pangan, pengujian mutu produk pangan segar, sertifikasi dan registrasi pangan segar.

Upaya DKP dalam mewujudkan keadilan gender dilakukan melalui pemberdayaan kelompok wanita dalam pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu juga dengan pelibatan anggota perempuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

3.3 Telaahan Renstra K/L, Provinsi dan Pemda

3.3.1 Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi tahun 2020-2024, yaitu: **“Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”**. Badan Ketahanan Pangan berperan sebagai “lead institution” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- b. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
- c. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
- d. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- e. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Target kinerja “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat” Badan Ketahanan Pangan tahun 2020-2023, adalah:

1. Tercapainya kualitas ketersediaan pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;
3. Stabilitasnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) diatas atau sama dengan HPP;
4. Stabilitasnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan
5. Coefficient of Variation maksimum 5%;
6. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
7. Meningkatnya pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif dengan terpenuhinya konsumsi sesuai AKG;
8. Meningkatnya konsumsi pangan yang sehat dan aman sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 pada tahun 2024;
9. Tercapainya keamanan pangan segar dengan kandungan cemaran biologis, kimia, dan fisik pada pangan segar (dibawah ambang batas).

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di kabupaten sukabumi dan sesuai tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi. Dengan sasaran tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari kementerian pusat dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Tabel 19 . Telaah Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

No	Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
	<p>Visi: Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan</p> <p>Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal; b. Memantapkan penanganan kerawanan Pangan c. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok; d. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal; e. Mewujudkan keamanan pangan segar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pertanian pangan yang dilakukan oleh petani saat ini sebagian besar belum memberikan kesejahteraan dan keuntungan yang memadai. 2. Pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan produksi pangan. 3. Luas lahan pertanian pangan terus Menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif, adanya kompetisi pemanfaatan lahan pertanian pangan untuk penggunaan non pangan. 4. Ketersediaan air makin berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan. 5. Fluktuasi harga beberapa komoditas pangan strategis. 6. Keamanan Pangan 7. Sistem pertanian pangan yang dilakukan oleh petani saat ini sebagian besar belum memberikan kesejahteraan dan keuntungan yang memadai 8. Pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan produksi pangan. 9. Luas lahan pertanian pangan terus menyusut 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan yang dikelola anggota kelompok tani relatif sempit 2. Usaha yang dikelola kelompok belum optimal dan berskala rumah tangga <p>Faktor Pendorong</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi dalam pengembangan usaha pertanian 4. Revolusi Industri 4.0 berbasis internet <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan yang dikelola anggota kelompok tani relatif sempit 2. Usaha yang dikelola kelompok belum optimal dan berskala rumah tangga

3.3.2 Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Dalam mendukung terwujudnya Visi Jawa Barat 2005-2025 yaitu : "Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia", dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode tahun 2018-2023 adalah "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Bathin dengan Inovasi dan Kolaborasi" dengan 5 misi, dimana tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan masuk kedalam misi 4 yaitu "Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan" dengan tujuan ke 7 yaitu "Petani Juara" fokus kepada :

- a. Produktivitas petani ditingkatkan dengan menyalurkan berbagai bantuan kepada para petani berupa bantuan bibit, pupuk dan obat sasarannya adalah Petani di Jawa Barat.
- b. Irigasi Pertanian menjadi sumber penghidupan para petani, oleh karena itu akses yang mudah terhadap irigasi menjadi prioritas untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian Jawa Barat sasarannya adalah : Pertanian di Jawa Barat.
- c. Gudang tani juara dengan pembangunan gudang di setiap kab/kota yang akan melindungi petani setempat dari resiko kerusakan hasil produksi serta mengendalikan harga komoditas tersebut sasarannya adalah Kab/Kota di Jawa Barat.

Secara umum tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan yang mendukung kedalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) tingkat konsumsi dan Nilai Tukar Petani (NTP). Secara terperinci untuk mendukung kedua indikator kinerja daerah tersebut dituangkan kedalam Indikator Kinerja Program yang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi 2021-2026 terdapat dalam RPJMD dan juga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Indikator kinerja rencana strategis dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu : meningkatkan konsumsi dan ketersediaan pangan serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan dengan sasarannya adalah "meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan dan gizi serta meningkatnya produksi dan daya saing produk". Adapun tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam beberapa indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja utama yang melekat pada eselon 2 (dua) untuk mendukung terhadap misi 4 (empat) RPJMD Provinsi Jawa Barat.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 memerhatikan kebijakan penataan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032. Tujuan penataan ruang Kabupaten Sukabumi adalah mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing dibidang agribisnis, pariwisata dan industri berwawasan lingkungan menuju kabupaten yang religius, maju dan sejahtera. Wilayah perencanaan RTRW terdiri dari 47 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sukabumi meliputi:

1. Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan;
2. Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan;
3. Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
4. Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal;
5. Pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan system pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis;
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan ataupun sebaliknya. KLHS dimaksudkan untuk menyelenggarakan analisis secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi. KLHS bertujuan untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi, serta menjamin program/arah kebijakan di Kabupaten Sukabumi telah memperhatikan keutuhan dan keselamatan lingkungan hidup.

KLHS Kabupaten Sukabumi merupakan KLHS RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD. KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Muatan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 terfokus pada 5 (lima) TPB prioritas sebagai berikut:

1. TPB 1 : Tanpa kemiskinan
2. TPB 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera
3. TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan
4. TPB 11 : Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
5. TPB 15 : Ekosistem darat

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi berkaitan dengan TPB 1 : Tanpa Kemiskinan, TPB 3 : kehidupan Sehat dan Sejahtera serta TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan sebagai berikut :

Tabel 20. Arah kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 1 dan TPB 10 sesuai kewenangan Dinas Ketahanan Pangan

Outcome	Arah Kebijakan	Program	Para Pihak
Menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatny a kesejahteraan masyarakat	Pengentasan kemiskinan akibat adanya pandemi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
Berkurangnya kesenjangan dengan peningkatan ekonomi masyarakat	Pengentasan kemiskinan akibat adanya pandem	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi, pemilihan isu strategis juga memperhatikan kondisi Kabupaten Sukabumi, dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Sukabumi. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan

Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Kabupaten Sukabumi secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Kabupaten Sukabumi. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor. Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Kabupaten Sukabumi surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stock beras.

Ketersediaan pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

2. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Informasi Harga, Rantai Pasok, Jaringan Distribusi dan Sistem Logistik Daerah

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Desa Rentan Rawan Pangan

Potensi Desa rentan rawan pangan di Kabupaten Sukabumi masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah Kabupaten dan cadangan pangan pemerintah.

5. Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

6. Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan strategi-strategi yang dipilih serta menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai gambaran impact pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi. Melalui misi organisasi kita dapat mengetahui untuk tujuan apa organisasi itu didirikan dan mengapa organisasi itu ada. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan didukung oleh data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya dalam dokumen RPJMD ini. Tujuan dan sasaran merupakan buah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

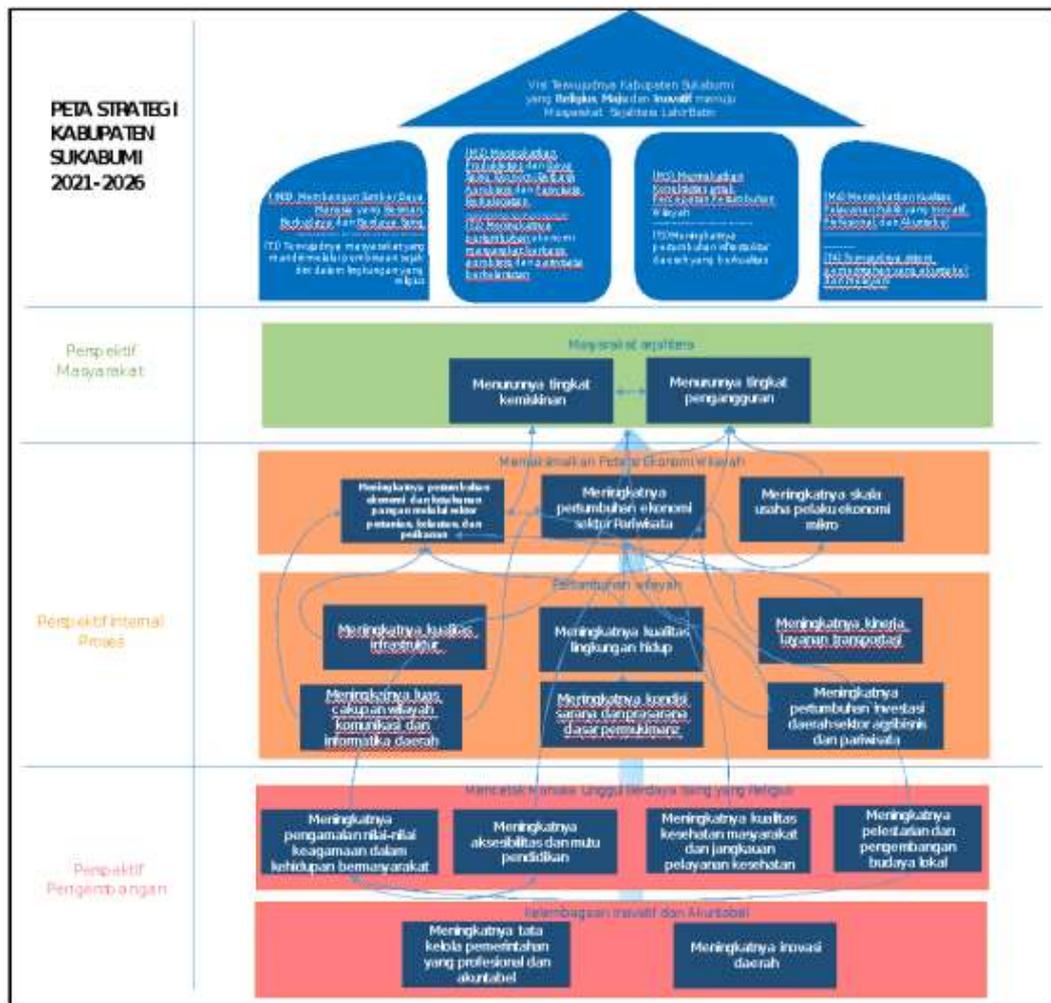
Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih juga dapat menjembatani antara strategi dan arah kebijakan yang diambil selama periode RPJMD yang telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi dapat menjadi sarana untuk melaksanakan dan sekaligus sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 memiliki indikator kinerja yang *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound)* untuk menggambarkan capaian kinerja pembangunan secara kuantitatif.

Hasil perumusan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Tujuan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi yang berkaitan langsung dengan Ketahanan Pangan yang sudah dirumuskan ke dalam RPJMD adalah: "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan."

Merunut pada hal tersebut, maka Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 21 (T.C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sukabumi Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
				2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN											
Misi 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan.											
1	T2 :Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	SS8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen)	-1,08	2,23	3,30	4,36	5,42	5,49	5,55	5,55
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Point)	82,28	84,60	85,10	85,60	86,10	86,60	87,10	87,10



Gambar 12. Peta Strategi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021- 2026

Metodologi yang tergambar pada Gambar Peta Strategi Kabupaten Sukabumi merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara sasaran-sasaran strategis yang diadaptasi dari metodologi balanced scorecard dimana semua sasaran saling terkait untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) perspektif yakni perspektif masyarakat, perspektif internal proses, dan perspektif pengembangan. a. Perspektif masyarakat Sudut pandang ini menjabarkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, dengan sasaran di dalamnya terkait erat terhadap definisi masyarakat sejahtera pada pernyataan visi dan misi. b. Perspektif internal proses Sudut pandang ini menjabarkan proses internal yang harus diunggulkan Kabupaten Sukabumi dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi unggulan daerah diharapkan dapat

digali semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat melalui perangkat daerah dari berbagai sektor yang saling bersinergi. c. Perspektif pengembangan Sudut pandang ini menjabarkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan. Fokus pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah kesejahteraan yang distimulasi oleh pengembangan lembaga, manusia, dan inovasi.

Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Jawa Barat 2018-2023, dan sasaran pembangunan RPJMN tahun 2020-2024. Secara rinci keterkaitan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan Nasional dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 22. Keterkaitan sasaran RPJMN, RPJMD Jawa Barat, dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi.

Sasaran RPJMN	Sasaran RPJMD Jawa Barat	Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi
S8. Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan	S2. Meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat	S5. Menurunnya tingkat kemiskinan
	S16. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	S8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 2021-2026

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan visi dan misi. Prioritas pembangunan tersebut tersaji pada Tabel berikut ini.

Tabel 23. Prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi 2021-2026

Prioritas Pembangunan	
Ekonomi	Pengembangan Komoditas Unggulan melalui Hilirisasi dan Perluasan Akses Pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah
	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan

Prioritas pembangunan ini akan dielaborasi melalui program-program unggulan yang akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam proyek strategis. Prioritas pembangunan di atas menjadi fokus utama dalam pencapaian sasaran strategis, tujuan daerah, visi daerah, hingga misi daerah. Keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan, sasaran strategis, tujuan daerah, misi daerah, dan visi daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 24. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi.

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan
Visi :	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin	
Misi 2 :	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	
Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	
	Meningkatnya pertumbuhan investasi sektor agribisnis daerah dan pariwisata	
	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	
		Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas Ketahanan Pangan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang kemudian dijabarkan lebih rinci dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program dan kegiatan dalam rancangan awal RPJMD kabupaten Sukabumi. Strategi dan kebijakan ini menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Sukabumi untuk mencapai tujuan dan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas ketahanan pangan Kabupaten Sukabumi sesuai dengan kewenangannya. Merujuk pada isu strategi RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026 yaitu :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat, permasalahan sosial, dan ketahanan bencana;
3. Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dengan peningkatan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
4. Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur daerah pendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar; serta
5. Reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, strategi yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas ketahanan pangan, maka strategi yang dilaksanakan adalah dengan strategi yaitu : menyediakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman,

5.2 Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Perumusan strategi memperhatikan masalah yang telah dituangkan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan

strategi akan mendefinisikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan diantaranya adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, cadangan dan keamanan pangan
2. Mengkampanyekan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu
3. Meningkatkan pengankaraman pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan disajikan pada Tabel 24, serta deskripsi dari setiap strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel 25 berikut ini.

Tabel 25. (T.C 26) Tujuan, Sasaran, Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
Visi	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin		
Misi 2	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan		
Tujuan 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	08.03 Menyediakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	08.03.01 Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, cadangan dan keamanan pangan
			08.03.02 Mengkampanyekan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu
			08.03.03 Meningkatkan pengankaraman pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan

Tabel 26. Deskripsi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026

Deskripsi Strategi	Deskripsi Arah Kebijakan
08.03 Menyediakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman: Diharapkan dengan strategi ini, skor PPH Kabupaten Sukabumi bisa meningkat.	08.03.01 Melakukan upaya penguatan keamanan dan ketahanan pangan yang berfokus pada penyediaan, optimalisasi jalur distribusi, pemenuhan cadangan pangan
	08.03.02 Melakukan upaya penyebaran informasi dan mengkampanyekan pada seluruh lapisan masyarakat, terutama anak usia sekolah terkait diversifikasi pangan berbasis local content guna mendukung keseimbangan gizi masyarakat.
	08.03.03 Menggiatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi di tingkat rumah tangga dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang memiliki pekarangan dalam budidaya anekaragam sumber pangan pada lahan terbatas.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dicapai melalui implementasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Khusus untuk periode RPJMD dan Renstra ini program dan Kegiatan yang dilaksanakan telah ditetapkan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri No 50-3780 tahun 2020 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan pemutkhiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kedepannya nomenklatur program dan kegiatan untuk sestiap urusan pemerintahan akan seragam di seluruh Indonesia.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang ada. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Mebel
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Kegiatan

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jamur
- c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
- e. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur
- f. Pendukung Kemandirian Pangan

III. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Kegiatan :

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- d. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- e. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- f. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- g. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

2. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
Sub Kegiatan :
 - a. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
 - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - c. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Sub Kegiatan :
 - a. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
4. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Sub Kegiatan
 - a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

IV. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Kegiatan :

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota
- e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya mengenai rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel 27 dibawah ini.

Tabel 27 (C.27) Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan																	
Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan																	
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.09.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	100	10.098,9	100	9.900,0	100	10.548,1	100	10.786,6	100	12.816,0	100	54.149,7	DKP	Kab. Smi
2.09.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100	100	390,0	100	325,0	100	423	100	465	100	500	100	2.103	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		3	250,00	3	145,00	3	275,00	3	300,00	3	315,0	15	1.285,0	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen		1	15,00	1	25,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	5	85,0	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen		1	15,00	1	25,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	5	85,0	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen		1	15,00	1	25,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	5	85,0	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen		1	15,00	1	25,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	5	85,0	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		3	50,00	3	30,00	3	33,00	3	40,0	3	50,0	15	203,0	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		3	30,00	3	50,00	3	55,00	3	65,0	3	75,0	15	275,0	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	5.596,9	100	6.266,2	100	6.600,2	100	6.862,5	100	6.874,7	100	32.200,6	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan		14	5.531,9	35	6.150,7	35	6.500,0	35	6.750,0	35	6.750,0	154	31.682,6	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		1	-	1	15,0	1	16,50	1	20,0	1	23,0	5	74,5	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	20,0	1	20,9	1	22,96	1	25,0	1	27,5	5	116,3	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen		2	15,0	2	36,0	2	39,60	2	42,5	2	46,8	10	179,9	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		3	15,0	3	27,2	3	3,00	3	5,0	3	5,5	15	55,7	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen		1	15,0	1	16,5	1	18,15	1	20,0	1	22,0	5	91,6	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	20,0	100	64,0	100	68,58	100	73,5	100	78,9	100	304,9	DKP	Kab. Smi
2.09.01 .2.03.0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		0	-	1	12,5	1	13,75	1	15,1	1	16,6	4	58,0	DKP	Kab. Smi
2.09.01 .2.03.0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	20,0	1	36,5	1	38,33	1	40,2	1	42,3	5	177,3	DKP	Kab. Smi
2.09.01 .2.03.0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	-	1	15,0	1	16,50	1	18,2	1	20,0	4	69,6	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	300,0	100	304,7	100	335,13	100	386,8	100	425,4	100	1.752,0	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		4	125,0	4	129,7	4	142,63	4	175,0	4	192,5	20	764,8	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen		55	15,0	55	15,0	55	16,50	55	18,2	55	20,0	275	84,6	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen		55	20,0	55	20,0	55	22,00	55	24,2	55	26,6	275	112,8	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		10	80,0	10	80,0	10	88,00	10	96,8	10	106,5	50	451,3	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		1	30,0	1	30,0	1	33,00	1	36,3	1	39,9	5	169,2	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		55	30,0	55	30,0	55	33,00	55	36,3	55	39,9	275	169,2	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.01 .2.06 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	845,0	100	846,4	100	890,37	100	979,4	100	1.077,3	100	4.638,5	DKP	Kab. Smi
2.09.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket		10	10,0	1	10,0	1	11,00	1	12,1	1	13,3	14	56,41	DKP	Kab. Smi
2.09.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		1	300,0	1	300,0	1	329,99	1	363,0	1	399,3	5	1692,26	DKP	Kab. Smi
2.09.01 .2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket		10	25,0	1	25,0	1	27,50	1	30,3	1	33,3	14	141,03	DKP	Kab. Smi
2.09.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		1	25,0	1	24,4	1	26,88	1	29,6	1	32,5	5	138,39	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	paket		1	30,0	1	30,0	1	33,00	1	36,3	1	39,9	5	169,2	DKP	Kab. Smi
2.09.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen		12	40,0	2	40,0	2	44,00	2	48,4	2	53,2	20	225,6	DKP	Kab. Smi
2.09.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12	30,0	1	30,0	1	33,00	1	36,3	1	39,9	16	169,23	DKP	Kab. Smi
2.09.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	350,0	3	350,0	3	385,00	3	423,5	3	465,9	13	1.974,35	DKP	Kab. Smi
2.09.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen		12	15,0	1	15,0	1	16,50	1	18,2	1	20,0	16	84,62	DKP	Kab. Smi
2.09.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen		1	20,0	0	22,0	1	22,00	0	-	1	24,2	3	88,20	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	1.341,7	100	249,1	100	275,00	100	302,5	100	1.533,6	100	3.701,8	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		5	571,7	0	-	0	-	0	-	5	628,8	10	1.200,5	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1	520,0	0	-	0	-	0	-	1	572,0	2	1.092,0	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		3	100,0	6	100,0	8	110,00	8	121,0	10	133,1	35	564,1	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1	150,0	2	149,1	3	165,00	3	181,5	3	199,7	12	845,2	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	734,6	100	862,4	100	878,03	100	965,8	100	1.062,4	100	4.503,2	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	-	12	-	12	-	12	-	12	-	48	-	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan		12	56,4	12	98,4	12	62,04	12	68,2	12	75,1	60	360,2	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1	50,0	1	122,8	1	125,00	1	137,5	1	151,3	5	586,6	DKP	Kab. Smi
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		13	628,2	1	641,2	1	690,99	1	760,1	1	836,1	17	3.556,5	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	870,8	100	982,2	100	1.077,84	100	751,1	100	1.263,7	100	4.945,6	DKP	Kab. Smi
2.09.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		12	437,2	15	415,0	15	480,93	15	529,0	15	581,9	72	2.444,1	DKP	Kab. Smi
2.09.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		12	143,6	3	128,6	3	157,91	3	173,7	3	191,1	24	794,8	DKP	Kab. Smi
2.09.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit		5	15,0	5	16,9	5	16,50	5	18,2	5	20,0	25	86,5	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.01 .2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		6	25,0	6	24,9	6	27,50	6	30,3	6	33,3	30	140,9	DKP	Kab. Smi
2.09.01 .2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		0	-	0	-	1	120,00	0	-	1	135,0	2	255,0	DKP	Kab. Smi
2.09.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	200,0	0	396,8	2	220,00	0	-	2	242,0	5	1.058,8	DKP	Kab. Smi
2.09.01 .2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	50,0	0	-	2	55,00	0	-	2	60,5	5	165,5	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	%	14,29	12,5	2.000	11,11	4.500	10,00	4.500	18,18	4.500	15,38	4.500	81,45	20.000	DKP	Kab. Smi
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pangan yang difasilitasi	Unit	8	9,0	2.000	10,0	4.500	11,0	4.500	13,0	4.500	15,0	4.500	66,0	20.000	DKP	Kab. Smi
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	unit		3	850	3	2.355,1	4	4.090,00	4	4.318,0	5	4.523,2	19	10.270,3	DKP	Kab. Smi
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai jemur yang tersedia	Unit		3	350	3	525,7	4	913,56	4	1.096,3	5	1.260,7	19	2.452,8	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.02 .2.01.0 3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian lainnya yang tersedia	Unit		3	400	4	853,2	3	853,2	5	853,2	5	853,2	20	3.812,9	DKP	Kab. Smi
2.09.02 .2.01.0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan		1	200	1	389,0	1	389,0	1	389,0	1	389,0	5	1.756,0	DKP	Kab. Smi
2.09.02 .2.01.0 5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen		1	200	1	377,0	1	377,0	1	377,0	1	377,0	5	1.708,0	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.03	Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	%	23,37	25,49	2.200	31,87	3.500	38,24	3.500	44,61	3.500	50,98	3.500	50,98	16.200	DKP	Kab. Smi
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Indeks koefisien harga pangan pokok (komoditas)	Dokumen	1	1	1.000	1	1.483,5	1	1.483,5	1	1.483,5	1	1.483,5	1	6.934	DKP	Kab. Smi
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan		1	175,0	1	203,5	1	203,5	1	203,5	1	203,5	5	988,8	DKP	Kab. Smi
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan		1	175,0	1	209,6	1	209,6	1	209,6	1	209,6	5	1.013,5	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan		1	100	1	136,3	1	136,3	1	136,3	1	136,3	5	645,1	DKP	Kab. Smi
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen		1	220	1	269,2	1	269,2	1	269,2	1	269,2	5	1.297,0	DKP	Kab. Smi
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit		20	150	22	231,1	24	231,1	26	231,1	28	231,1	120	1.074,6	DKP	Kab. Smi
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit		1	180	2	243,6	3	243,6	4	243,6	6	243,6	16	1.154,2	DKP	Kab. Smi
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga		-	0	30	190,2	30	190,2	30	190,2	30	190,2	120	760,8	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.03.2.02	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Cadangan Pangan yang dikelola</i>	Ton	8	40	1.050	50	1.272,2	60	1.272,2	70	1.272,2	80	1.272,2	300	6.139,0	DKP	Kab. Smi
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan		1	75	1	84,8	1	84,8	1	84,8	1	84,8	5	414,0	DKP	Kab. Smi
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen		1	75	1	118,3	1	118,3	1	118,3	1	118,3	5	548,3	DKP	Kab. Smi
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton		40	800	50	911,3	60	911,3	70	911,3	80	911,3	300	4.445,2	DKP	Kab. Smi
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton		40	100	50	157,9	60	157,9	70	157,9	80	157,9	300	731,5	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.03 .2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal	dokumen	0	1	75	1	80	1	80	1	80	1	80	5	395	DKP	Kab. Smi
2.09.03 .2.03.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan		1	75	1	80	1	80	1	80	1	80	5	395	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatkan Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Perkapita/ tahun	dokumen	1	1	1.160	1	664,3	1	664,3	1	664,3	1	664,3	5	3.817,0	DKP	Kab. Smi
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen		1	200	1	200,3	1	200,3	1	200,3	1	200,3	5	1.001,4	DKP	Kab. Smi
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan		1	810	1	359,2	1	359,2	1	359,2	1	359,2	5	2.246,8	DKP	Kab. Smi
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan		1	150	1	104,7	1	104,7	1	104,7	1	104,7	5	568,8	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatkan Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.04	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	%	14,47	17,11	500	17,11	750	17,11	750	17,11	1.000	17,11	1.000	100	4.000	DKP	Kab. Smi
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang disusun	dokumen	1	1	175	1	280,3	1	280,3	1	350	1	350	5	1.435,6	DKP	Kab. Smi
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen		1	175	1	280,3	1	280,3	1	350	1	350	5	1.435,6	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.04 .2.02	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Desa rentan rawan pangan yang ditangani	desa	11	13	325,0	13	469,7	13	469,7	13	650	13	650	76	2.564,4	DKP	Kab. Smi
2.09.04 .2.02.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan		1	175,0	1	217,3	1	217,3	1	300	1	300	5	1.209,5	DKP	Kab. Smi
2.09.04 .2.02.0 2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	150,0	1	252,4	1	252,4	1	350	1	350	5	1.354,9	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatkan Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.05	Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	%	100	100	1.000	100	1.000	100	1.250	100	1.500	100	1.500	100	6.250	DKP	Kab. Smi
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kegiatan	5	5	1.000	5	1.000	5	1.250	5	1.500	5	1.500	25	6.250	DKP	Kab. Smi
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen		1	200	1	169,4	1	225	1	275	1	275	5	1.144,4	DKP	Kab. Smi
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat		25	200	25	184,5	25	225	25	275	25	275	125	1.159,5	DKP	Kab. Smi

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.05 .2.01.0 3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	200	1	184,9	1	225	1	275	1	275	5	1.159,9	DKP	Kab. Smi
2.09.05 .2.01.0 4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	200	1	175,8	1	225	1	275	1	275	5	1.150,8	DKP	Kab. Smi
2.09.05 .2.01.0 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	200	1	285,4	1	350	1	400	1	400	5	1.635,4	DKP	Kab. Smi
Jumlah						15.798,9		19.650		20.548,1		21.286,6		23.316,0		100.599,7		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Untuk pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah, diperlukan tahapan pencapaiannya, dan dari setiap tahapan tersebut perlu ditetapkan tolok ukur/indikator tingkat keberhasilannya.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang harus dicapai oleh setiap perangkat daerah karena bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi membawahi urusan bidang pangan. Uraian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel 28.

Tabel 28. Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026.

a. IKK Outcome

No.	IKK Outcome	Formulasi	Kondisi awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	Jumlah cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan pangan sesuai permentan No. 11 Tahun 2018 dikali 100	43,81	23,37	25,49	31,87	38,24	44,61	50,98	50,98

b. IKK Output

No.	IKK Output	Satuan	Kondisi awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Unit	ada	5	7	9	11	13	15	15
2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	komoditas	ada	11	11	11	11	11	11	11
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Dokumen	Tidak ada	1	1	1	1	1	1	6
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Kegiatan	ada	5	5	5	5	5	5	30
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dokumen	ada	1	1	1	1	1	1	6
6	Tertanganinya kerawanan pangan	Desa	ada	11	13	13	13	13	13	76
7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	Desa	Tidak ada	5	6	7	8	9	10	45
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	PSAT Teregister	ada	10	12	15	17	20	22	96

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 29 (T-C 28). Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Formulasi	Kondisi awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan										
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Point)	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan (Ketersediaan)	92,8	93,3	93,8	94,3	94,8	95,3	95,8	95,8
Indikator Program Dinas Ketahanan Pangan										
1	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan			14,29	12,50	11,11	10,00	18,18	15,38	81,46
2	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola			23,37	25,49	31,87	38,24	44,61	50,98	50,38
3	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan			14,47	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	100
4	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan			100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan untuk periode 5 (lima) tahun, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Teknokratik Kementerian Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pola penjabaran RENSTRA dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian bisnis proses yang saling berkesinambungan.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Dinas Ketahanan Pangan dalam Penyusunan Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dan sebagai panduan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga dapat mewujudkan tata kelola organisasi pemerintahan yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi dan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 ini dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*), untuk semakin lebih berkinerja dan sebagai kunci keberhasilan pencapaian target kinerja.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUKABUMI



Dr. Ir. H. DANA BUDIMAN, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19620316 198903 1 007